

**Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Bandung**

L K I P

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Kota Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan lingkup keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung terdiri

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Informasi
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja
 3. Sub Bidang Anggaran belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendapatan, Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
 3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset membawahkan :
 1. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset;

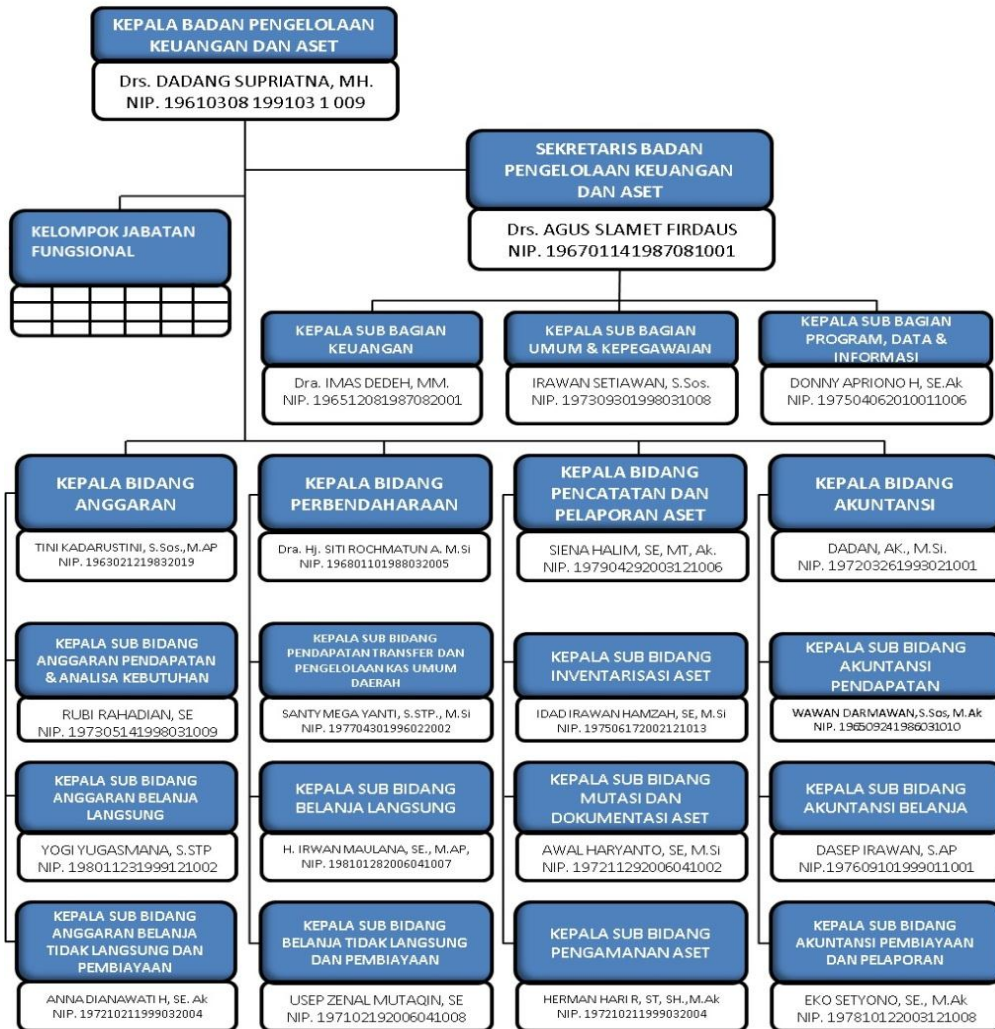




- 3. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban BPKA dipimpin oleh Drs. Dadang Supriatna, MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1404
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018



1.3. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi perangkat daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan perangkat daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Perubahan lingkungan Strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Adapun isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selama ini antara lain :

➤ **Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Sistem perencanaan sampai dengan penganggaran telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis WEB yaitu Aplikasi SIRA (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah membawa konsekuensi aplikasi SIPD menggantikan seluruh aplikasi yang telah ada (SIRA dan Simda keuangan).



2. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2019, sehingga diperlukan upaya-upaya penyesuaian baik secara kebijakan maupun teknis.

➤ **Lingkup Pengelolaan Aset Daerah**

1. Persentase aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat masih sangat kecil, yang pada periode akhir Renstra BPKA 2013-2018 masih dibawah 20% dari seluruh aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung.
2. Dalam hal pengamanan aset masih banyak aset tanah dan atau bangunan yang masih memerlukan pengamanan sehingga perlu dilakukan pemberian/pemasangan papan informasi aset milik Pemerintah kota Bandung.

1.4. Landasan Hukum

LKIP BPKA Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.



1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 27 Maret Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penyusunan Renstra BPKA mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 tertuang visi misi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman,
Sejahtera, dan Agamis”**



Sedangkan rumusan misi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1. MISI 1**
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
- 2. MISI 2**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- 3. MISI 3**
Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- 4. MISI 4**
Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- 5. MISI 5**
Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu kepada Misi ke-2, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.

Sedangkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam misi tersebut sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu

Tujuan:

Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran:

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator sasaran:

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Selain mengacu kepada Misi 2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai perangkat daerah yang mendukung keberhasilan untuk Misi 3 “Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan, sasaran: meningkatnya perekonomian kota, dengan indicator sasaran PDRB Per Kapita. Program yang mendukung pencapaian target sebagaimana pada misi ke-3 tersebut, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, dengan indicator kinerja penetapan APBD tepat waktu dan prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang didaftarkan/ bersertifikat dari BPN.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.





Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota

Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis. Terkait dengan perumusan visi, misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berpedoman pada visi, misi Kota Bandung sebagaimana tertuang pada pasal 269 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada ayat 3 point (a) disebutkan bahwa visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Visi Perangkat Daerah mengacu pada visi Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung:

- **Visi Kota Bandung : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Misi



Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu pada Misi ke 2, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih”.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Permusunan tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BPKA untuk Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor “ 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Hari Kerja	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP	Tepat waktu, Maksimal 60 Hari Kerja untuk RAPBD dan 30 Hari Kerja untuk RAPBDP
			Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
			Laproan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat /didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	19%	21%	24%	27%	30%
			Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai Peraturan Perundang-undangan	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi	30 Bidang/ Lokasi
			Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan laporan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat		84,5	85,3	pm
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti			100	100	100	100



Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome) Indikator Capaian Program	Satuan	Target	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	Hari Kerja	(60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP)	Dari ditandatanganinya KUA /PPA sampai RAPBD- RAPBDP	Lama Penyusunan RAPBD maksimal 60 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA /PPA dan Lama Penyusunan RAPBDP maksimal 30 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA/ PPA Perubahan
		Rata rata Penerbitan SP2D tepatwaktu dan sesuai Perundang undangan	Hari kerja	2 Hari kerja	Berdasarkan tanggal masuk penerimaan SPM yang lengkap dan sah serta tanggal terbitnya SP2D	Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan, lama waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	14	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang- undangan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	2	Laporan BMD	Laporan BMD Kota Bandung Tahunan dan Semesteran
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang / Lokasi	30	Bidang Tanah/ Lokasi	Bidang Tanah kota Bandung yang telah dilakukan Pengamanan Fisik
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	%	21	Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,5	Pengguna layanan BPKA diantaranya adalah pengelola keuangan seluruh OPD di Kota Bandung	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dari kuesioner yang diisi oleh setiap OPD di Kota Bandung
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	Berdasarkan tindaklanjuti temuan	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK/Inspektorat dikali 100%



Dasar/kepentingan sasaran dan indikator

Pada prinsipnya sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan menjalankan tupoksi berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar/Kepentingan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	Amanat Pasal 104 dan pasal 109 PP No 12 Tahun 2019
		Rata rata Penerbitan SP2D tepatwaktu dan sesuai Perundang undangan	Amanat Pasal 149 dan pasal 109 PP No 12 Tahun 2019
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Amanat Pasal 190 PP No 12 Tahun 2019
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Amanat Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Amanat Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	Amanat Pasal 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019



Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai



dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	(60 Hari kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP)
		Rata rata Penerbitan SP2D tepatwaktu dan sesuai Perundang undangan	2 Hari kerja
		Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	14
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	2 Dokumen
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	30 Bidang/ Lokasi



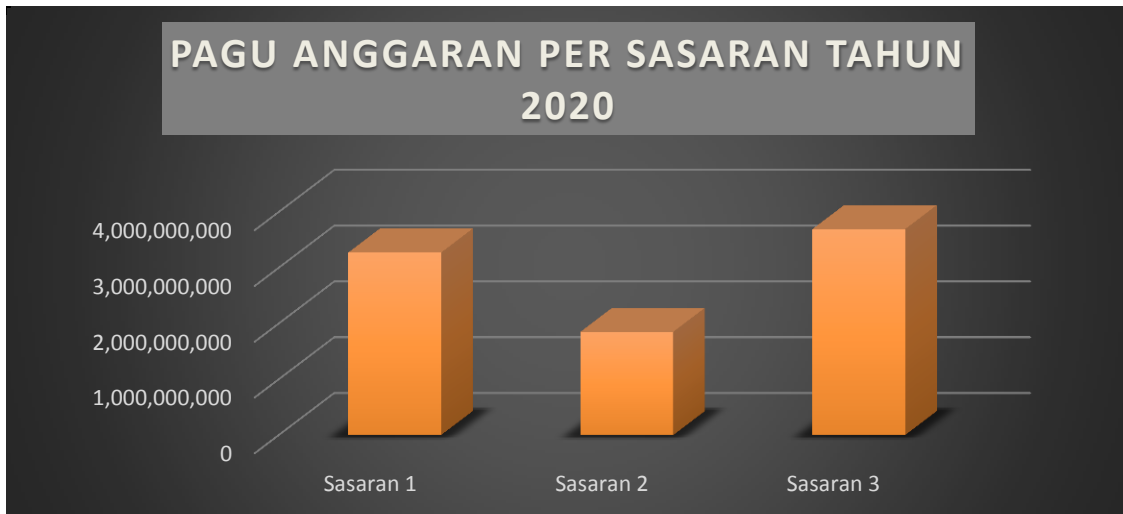
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	21%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks 84,5
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %

Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPKA Tahun 2020 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah, serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu yang terdiri dari 8 indikator kinerja didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.823.783.940,-

Tabel 2.4
Anggaran Per Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program/Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rp)
1	Sasaran 1	1 Program / 20 Kegiatan	3.274.592.803
2	Sasaran 2	1 Program / 5 Kegiatan	1.854.453.018
3	Sasaran 3	4 Program / 15 kegiatan	3.694.738.119
	Jumlah	6 Program / 40 Kegiatan	8.823.783.940



1.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Pada Renstra BPKA 2013-2018, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada indikator kinerja maupun pada targetnya. Reviu dimaksud memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Reviu juga dilakukan dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 yang berimbas juga kepada perubahan uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2020 mengacu kepada Rencana Strategis 2018-2023. Dan merupakan periode pelaksanaan Renstra tahun kedua dan belum dilakukan reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban dalam hal penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.



Kerangka Pengukuran Kinerja



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode
----	-----------------------	---------------------	------



			Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada **Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2020** yang terdiri dari 3 sasaran strategis dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi



pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	hari kerja	Tepat waktu (90)	Tepat waktu (52)	151.00
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	hari kerja	2	2	100.00
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	dokumen	14	14	100.00
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	dokumen	2	2	100.00
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Tanah/ Lokasi	30	30	100.00
6	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	%	21	22,78	108.00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,5	85,26	100,8
8	Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100%	100.00

Nilai tertinggi dari pencapaian kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 151 % untuk penyusunan RAPBD dan RAPBDP merupakan hasil penghitungan dari jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyusun RAPBD dan RAPBDP dibandingkan standar yang telah ditetapkan yaitu 60 hari kerja untuk RAPBD dan 30 hari kerja untuk RAPBDP. Realisasi pencapaian kinerja penyusunan RAPBD dan RAPBDP bergantung dari kerja bersama seluruh stakeholder diantaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran dan seluruh ASN yang terlibat dalam penyusunan RAPBD/RAPBDP.

Nilai tertinggi dari pencapaian kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 % yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah no 12 Tahun



2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP

Sesuai dengan tahapan penyusunan RAPBD sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa target penyampaian RAPBD mempunyai target waktu selama 60 hari kerja dari ditandatangani KUA/PPA. Penyampaian RAPBD tahun 2021 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 07 september 2020 dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPA pada tanggal 11 November 2020. Sehingga didapat realisasi waktu penyusunan RAPBD selama 46 hari kerja. Sehubungan dengan kondisi semakin rendah (cepat) realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerjanya maka berlaku formulasi %Pencapaian Kinerja = $(\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})) / \text{Target}$ dikali 100% sehingga prosentase capaian kinerja penyusunan APBD yaitu $(60 - (46 - 60)) / 60 \times 100\% = 123\%$

Sedangkan tahapan penyusunan RAPBDP sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa penyampaian RAPBDP mempunyai target waktu selama 30 hari kerja dari ditandatanganinya KUA/PPA perubahan. Realisasi penyampaian RAPBD Perubahan tahun 2020 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 9 September 2020 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBDP pada 16 September 2020. Sehingga didapat realisasi waktu penyusunan RAPBD Perubahan selama 6 hari kerja. Sehingga prosentase capaian penyusunan RAPBDP 2020 yaitu $(30 - (6 - 30)) / 30 \times 100\% = 180\%$.

Dari data diatas dapat disimpulkan realisasi Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	60 hari kerja	46 hari kerja	123 %

NO	TANGGAL	PERIHAL	PP 12 TAHUN 2019
-----------	----------------	----------------	-------------------------

Ketepatan waktu penyusunan RAPBDP	30 hari kerja	6 hari kerja	180 %
Capaian Kinerja Rata-Rata			151%

Keterangan : $151 \% = (123\% + 180 \%) / 2$

Berikut disajikan risalah penyusunan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2021:



1.	4 September 2020	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS APBD TA. 2021 <u>Nomor : KU.01.0105/1282-DPRD/IX/2020</u> ; HK03/2875-BAPPELITBANG/IX/2020 4 September 2020	Minggu II Bulan Agustus
2.	7 September 2020	SURAT EDARAN PENYUSUNAN RKA 2021	Minggu II Bulan Agustus
7.	30 September 2020	Usul Penyampaian Lembaran Kota Tahun 2020 Nomor 9 Tahun 2020	Minggu I Bulan September
8.	9 TAHUN 2020 30 September 2020	Lembaran Kota tentang Raperda APBD TA. 2021	Minggu I Bulan September
9.	8 OKTOBER 2020 Nomor 9 Tahun 2020	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RAPERDA APBD TA.2021 (NOTA KEUANGAN)	Minggu I Bulan September
	9 OKTOBER 2020	JAWABAN EKSEKUTIF THD NOTA KEUANGAN	
	3 NOVEMBER 2020 910/SE.137-BPKA	SURAT EDARAN INPUT ULANG RKA 2021	
	13 NOVEMBER 2020 KU/02.01/1609-BID I-BPKA/XI/2020	REVIU RAPERDA TENTANG APBD TA.2021 HASIL PEMUTAKHIRAN OLEH INSPEKTORAT	
	11 NOVEMBER 2020 KP.01.04/3707-BPKA/XI/2020	PENYAMPAIAN RAPERDA APBD 2021 HASIL PEMUTAKHIRAN	
10.	26 NOVEMBER 2020	PARIPURNA PERSETUJUAN DPRD THD RAPERDA APBD 2021	Minggu ke IV bulan November
11.	12 OKTOBER 2020 KU.01.04/3237-BPKA/X/2020	PENYAMPAIAN RAPERDA UNTUK EVALUASI GUBERNUR	Akhir Bulan November
12.	16 DESEMBER 2020 903/Kep.838-BPKAD/2020	Kep Gub tentang Hasil Evaluasi Raperda Kota Bandung Tentang APBD TA. 2021	Minggu III Bulan Desember
13.	23 DESEMBER 2020	Keputusan dewan terhadap Penyempurnaan dan penyesuaian atas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Dan Raperwal tentang penjabaran APBD TA. 2021	Akhir Bulan Desember
14.	23 Desember 2020 9 TAHUN 2020	<i>PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</i>	<i>Akhir Bulan Desember</i>
15.	23 Desember 2020 76 TAHUN 2020	<i>PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 062 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021</i>	

RISALAH PENYUSUNAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

2. Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan.



Penyelesaian SP2D tepat waktu merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/pmk.05/2007, pada pasal 13 disebutkan bahwa Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar.

Penerbitan SP2D dengan leading sector Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas pengajuan SPM dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang telah lengkap dan benar sejumlah 15.768 berkas, yang terdiri dari SP2D BTL Pembiayaan sebanyak 1.005 berkas; BTL Gaji dan tunjangan sebanyak 1.083 berkas; SP2D Belanja Langsung sebanyak 13.680 berkas dan seluruh berkas SP2D rata-rata diterbitkan maksimal 2 hari kerja. Dengan demikian untuk indikator rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan tercapai sesuai target (100%).

Adapun formulasi untuk indikator ini adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Rata rata} \\ \text{penerbitan SP2D} \\ \text{tepat waktu dan} \\ \text{sesuai Peraturan} \\ \text{Perundang-} \\ \text{undangan} \end{array} = \frac{\sum \text{Penerbitan SP2D yang} \\ \text{diselesaikan kurang/ sama} \\ \text{dengan 2 hari kerja}}{\sum \text{Pengajuan SP2D yang telah} \\ \text{lengkap dan benar dari} \\ \text{perangkat daerah/ stake holder} \\ \text{yang diterima oleh bidang} \\ \text{Perbendaharaan}} \times 100\%$$



3. Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan.

Laporan keuangan Kota Bandung telah terealisasi sebanyak 14 dokumen dari target 14 dokumen. Laporan dimaksud terdiri dari laporan keuangan hasil rekon dengan seluruh perangkat daerah yang dilakukan setiap bulan, laporan semester 1, laporan keuangan tahunan dengan leading sektor Bidang Akuntansi. Adapun laporan dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun. hal ini didasarkan pada kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan laporan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Non-Tunai, yang didalamnya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan. Adapun formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan keuangan bulanan berupa laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia; laporan semesteran; Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (LKPD)

4. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan.

Kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan barang milik daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengeolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 479 point “(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan barang pengelola tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah”.



Untuk tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menyusun laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan sebanyak 2 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Laporan BMD per 31 Desember 2019 dan laporan BMD semester 1 tahun 2020. Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan tercapai 100%.

Adapun formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan BMD yang terdiri dari laporan semesteran dan laporan barang pengelola tahunan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan
Dalam hal pengamanan aset pemerintah daerah berkewajiban juga melakukan pengamanan fisik. Tanah dan atau bangunan yang masih kosong/ belum ada pemanfaatannya dilaksanakan identifikasi dan pengamanan dengan jalan dilakukan pematokan atau pemasangan papan nama yang menjelaskan kepemilikan Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2019, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan pengamanan fisik atas tanah/bangunan sebanyak 30 bidang/lokasi. Dengan demikian capaian untuk target Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan telah tercapai 100%. Adapun pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah bidang/lokasi tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik berupa pematokan

6. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN.
Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna



Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya". Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut pengamanan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset milik daerah meliputi pengamanan fisik; pengamanan administratif; dan pengamanan hukum

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terus berupaya melakukan pensertifikatan tanah daerah melalui kegiatan sertifikasi tanah sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra BPKA 2018-2023. Untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Bandung telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah melalui BPN sebesar 22.78% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung. Sampai dengan tahun 2020 luas lahan yang telah bersertifikat seluas 4.308.537 atau 22.78% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung seluruhnya dengan luas 18.913.686 m². Target prosentase luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 sebesar 21%. Sehingga capaian kinerja Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN tercapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 108%.

Adapun formulasi pengukuran untuk indikator ini yaitu:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Tanah Milik} \\ & \text{Pemerintah Kota} \\ & \text{Bandung} \\ & \text{Bersertifikat dan} \\ & \text{didaftarkan ke BPN} \end{aligned} = \frac{\begin{aligned} & \text{Luas lahan milik Pemerintah} \\ & \text{Kota Bandung Bersertifikat} \\ & \text{dan didaftarkan ke BPN} \end{aligned}}{\begin{aligned} & \text{Luas lahan milik Pemerintah} \\ & \text{Kota Bandung (pada awal} \\ & \text{periode Renstra)} \end{aligned}} \times 100\%$$



7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2020 dilakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan rincian :

- Lokus : Loker pelayanan penerbitan SP2D
- Responden : pengelola keuangan Pemkot Bandung
- Jumlah responden : 63 orang
- Nilai IKM : 85,26
- Kriteria : Baik

8. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Sebagai entitas keuangan, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset secara berkala dilakukan audit oleh BPK RI dan atau inspektorat.

Berdasarkan laporan hasil kinerja BPKA dalam kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Bandung, seluruh temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Menindaklanjuti Surat Bapak Wali Kota Bandung no. 700/087-Inspektorat tanggal 6 Juli 2020 perihal instruksi penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang tertuang pada Surat No. 900/814-Sekr.BPKA/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 kepada Bapak Wali Kota Bandung melalui Inspektur Kota Bandung perihal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI.



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP, dengan capaian kinerja rata-ratanya 151%, pada indikator Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN, dengan capaian kinerja 108 %, pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,80%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan, dengan capaian kinerja 100 %, dan pada indikator Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	hari kerja	Tepat waktu (90)	Tepat waktu (52)	151.00
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	hari kerja	2	2	100.00
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	dokumen	14	14	100.00
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	dokumen	2	2	100.00
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Tanah/ Lokasi	30	30	100.00
6	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	%	21	22,78	108.00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,5	85,26	100.80
8	Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00

Home Bandung Raya Bandung

Kota Bandung Raih Opini WTP dari BPK

Senin, 29 Juni 2020 17:56 WIB  Nur Khansa Ranawati



Wali Kota Bandung Oded M Danial (kanan) bersama Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan. (Ayobandung.com/Nur Khansa Ranawati)



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampai Target	37,50 %
2	Sesuai Target	62,50 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampai target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	8	3	37,50	5	62,50	0	0.00
	Jumlah	8	3	37,50	5	62,50	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 2	8	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	37,50 %
2	Sesuai Target	5	62,50 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	hari kerja	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari kerja	26 HK RAPBD dan 2 HK RAPBDP	157.00	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari kerja	46 Hari Kerja RAPBD dan 6 Hari kerja	151.00
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	hari kerja	2	2 Hari Kerja	100.00	2	2	100.00
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	dokumen	14	14 Dokumen	100.00	14	14	100.00





Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP" adalah 46 hari kerja untuk RAPBD dari target sebesar tepat waktu 60 Hari Kerja, dan 6 hari kerja untuk RAPBD dari target Tepat waktu 30 hari kerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja rata-ratanya adalah 151.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP" tahun 2019 sebesar 157% sedangkan tahun 2020 sebesar 151.00%. Penurunan prosentase capaian kinerja ini tidak menunjukkan bahwa kinerja menurun, tetapi pada intinya penetapan APBD tepat waktu dapat mendukung atau menjadi nilai tambah oleh BPK R.I. dalam menentukan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP" tahun ini adalah sebesar 151.00% (tepat waktu), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 100.00% (tepat waktu).

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan" adalah sebesar 2 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan " adalah sebesar 14 dari target sebesar 14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga



persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %..

Tabel 3.7

Analisis pencapaian sasaran

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	<p>1.1. Indikator kinerja “Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP” Sesuai dengan tahapan penyusunan RAPBD sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa target penyampaian RAPBD mempunyai target waktu selama 60 hari kerja dari ditandatangani KUA/PPA, sedangkan untuk RAPBDP maksimal 30 Hari Kerja. Indikator kinerja “Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2020” direncanakan direalisasikan pada triwulan III, sedangkan “Ketepatan waktu penyusunan RAPBD tahun 2021” ditargetkan pada triwulan IV.</p> <p>1.2. Indikator kinerja “Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” Sesuai amanat PMK NOMOR 82/PMK.05/2007 Pasal 13 Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar” .</p> <p>1.3. Indikator kinerja “Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” Laporan dimaksud yaitu 12 Laporan Bulanan ; 1 laporan Semesteran 1; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan pada kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan laporan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p>
--	---



	<p>sebagaimana amanat yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Non-Tunai, yang didalamnya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan. Adapun formulasi pengukuran ketercapaian indikator ini yaitu jumlah laporan keuangan bulanan berupa laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia; laporan semesteran;</p> <p>Selain itu, pada Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 296 mensyaratkan bahwa PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.</p>
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	<p>1.1. Indikator kinerja “Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP” → Dari ditandatanganinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian RAPBD maksimal 60 Hari Kerja sedangkan untuk RAPBDP maksimal 30 Hari Kerja.</p> <p>1.2. Indikator kinerja “Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” → Waktu Penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan . Lama waktu penyelesaian maksimal 2 Hari Kerja.</p> <p>1.3. Indikator kinerja “Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” → 12 Laporan Bulanan ; 1 laporan Semesteran 1; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
Kinerja nyata dengan Rencana	<p>1.1. Indikator kinerja “ Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Perubahan telah terealisasi sesuai target yaitu pada triwulan III dengan waktu 6 hari kerja dari target maksimal 30 hari kerja, sedangkan Penyusunan RAPBD juga terealisasi</p>



	<p>sesuai target pada triwulan IV dengan waktu 46 hari kerja dari target maksimal 60 hari kerja.</p> <p>1.2. Indikator kinerja “Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” Target penerbitan SP2D tepat waktu telah terealisasi sesuai target yaitu 2 hari kerja. Yang terdiri dari pengajuan SP2D Belanja Langsung Barang/ Jasa sebanyak 13.680 lembar; SP2D LS Gaji sebanyak 1083 lembar SP2D; dan SP2D LS Non Gaji sebanyak 1055 lembar SP2D, dengan jumlah 15.768 lembar SP2D.</p> <p>1.3. Indikator kinerja “Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan dengan target 14 laporan keuangan telah terealisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari 12 Laporan Bulanan ; 1 laporan Semesteran 1; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya	Target kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” telah ditetapkan per triwulan bersifat tidak akumulasi, dan realisasinya telah sesuai dengan target/ rencana per triwulan yang telah ditetapkan.
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	<p>1.1.Indikator kinerja “ Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Perubahan telah terealisasi sesuai target yaitu pada triwulan III dengan waktu 6 hari kerja dari target maksimal 30 hari kerja, sedangkan Penyusunan RAPBD juga terealisasi sesuai target pada triwulan IV dengan waktu 46 hari kerja dari target maksimal 60 hari kerja. Dengan demikian capaian kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan yaitu 180% untuk RAPBD-P dan 123% untuk RAPBD.</p> <p>1.2. Indikator kinerja “Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan” Target penerbitan SP2D tepat waktu telah terealisasi sesuai target yaitu 2 hari kerja. Yang terdiri dari pengajuan SP2D Belanja Langsung Barang/ Jasa sebanyak 13.680 lembar; SP2D LS Gaji sebanyak 1083 lembar SP2D; dan SP2D LS Non Gaji sebanyak 1055 lembar SP2D, dengan jumlah 15.768 lembar SP2D. Dengan dengan</p>



	<p>demikian capaian kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan yaitu 100%.</p> <p>1.3. Indikator kinerja “Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan dengan target 14 laporan keuangan telah terrealisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari 12 Laporan Bulanan ; 1 laporan Semesteran 1; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian capaiannya yaitu 100 %.</p>
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	<p>Pada umumnya setiap Instansi pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD tepat waktu, serta menyampaikan laporan keuangan berupa data perkiraan belanja operasional dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan dan dilaporkan setiap bulannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia secara tepat waktu.</p>
Capaian Kinerja dengan Akhir Renstra	<p>1.1. Indikator kinerja “ Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Perubahan, pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Begitu pula target akhir Renstra ditargetkan tepat waktu (maksimal 60 hari kerja untuk RAPBD dan 30 hari kerja untuk RAPBDP).</p> <p>1.2. Indikator kinerja “Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan”</p> <p>Pada tahun 2020 Penerbitan SP2D tepat waktu telah terealisasi sesuai target yaitu 2 hari kerja. Begitu pula target akhir Renstra ditargetkan 2 hari kerja.</p> <p>Indikator kinerja “Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan, untuk tahun 2020 telah terrealisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari 12 Laporan Bulanan ; 1 laporan Semesteran 1; 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Begitu pula target akhir Renstra ditargetkan 14 dokumen.</p> <p>Indikator kinerja pada sasaran ini tidak bersifat akumulasi sehingga tidak dapat diperbandingkan</p>



	capaiannya dengan akhir tahun Renstra.
Faktor pendukung	Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2020, Ketersediaan anggaran, Koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait.
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none">- Dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, sehingga perlu tindak lanjut penyesuaian dalam bentuk penyusunan Raperda/Raperwal ataupun penyesuaian dalam bentuk SOP (aplikasi).- Kewajiban pengaplikasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri untuk penganggaran tahun 2021 sampai dengan penatausahaan keuangannya.- Serta dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan koordinasi / pelayanan tidak semaksimal sebelum pandemi.
Solusi	<ul style="list-style-type: none">- penyesuaian produk hukum daerah dalam bentuk penyusunan Raperda/Raperwal mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;- Koordinasi secara intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengaplikasian SIPD dalam penganggaran tahun 2021; melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada para perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait penganggaran dan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD.- Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal diutamakan secara virtual ataupun secara tatap muka dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang ketat.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	dokumen	2	2 Dokumen	100.00	2	2	100.00
2	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Tanah/ Lokasi	30	30 Bidang Tanah /Lokasi	100.00	30	30	100.00
3	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	%	19	20 %	105.00	21	22,78	108.00





Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan" adalah sebesar 2 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan" adalah sebesar 30 dari target sebesar 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN" adalah sebesar 22,78 dari target sebesar 21 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN" tahun ini meningkat 3.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 105.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN" tahun ini adalah sebesar 108.00 %, bila dibandingkan dengan



target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 73.33 %.

Tabel 3.9
Analisis pencapaian sasaran
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah”

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	<ol style="list-style-type: none">1.1. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan Laporan Barang Milik Daerah → Laporan BMD Kota Bandung Tahunan dan Semesteran (Semester 1). Adapun rencana realisasinya laporan BMD akhir tahun ditargetkan triwulan I dan laporan semester I ditargetkan pada triwulan III. Laporan-laporan dimaksud dijadikan sebagai acuan dalam hal penyusunan neraca keuangan Kota Bandung.1.2. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan Pengamanan BMD Kota Bandung → Target Jumlah lokasi/bidang tanah yang akan dilakukan pengamanan fisik tahun 2020 sebanyak 30 bidang. Adapun rencana realisasinya pada triwulan I sebanyak 7 lokasi; triwulan II sebanyak 8 lokasi; triwulan III sebanyak 7 lokasi; dan triwulan IV sebanyak 8 lokasi.1.3. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN untuk tahun 2020 ditargetkan 21%.
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	<ol style="list-style-type: none">1.1. Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan Laporan Barang Milik Daerah → Laporan BMD tahun n-1 dan Laporan BMD Semester 1 tahun berjalan.1.2. Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan → Jumlah Bidang Tanah Kota Bandung yang telah dilakukan Pengamanan Fisik1.3. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN → Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN dibandingkan dengan luas



	lahan milik Pemerintah Kota Bandung.
Kinerja nyata dengan Rencana	Kinerja nyata untuk keseluruhan target indikator kinerja pada sasaran ini telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari realisasi target kinerjanya maupun realisasi dari target pencapaian per triwulannya. Bahkan ada yang mencapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN tahun 2020 telah terealisasi 22,78% dari yang ditargetkan 21%.
Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya	Pengamanan BMD Kota Bandung pada akhir tahun ini telah terealisasi sesuai target yaitu 8 lokasi/bidang tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik. Begitu pula pada triwulan-triwulan sebelumnya yaitu triwulan I sebanyak 7 lokasi/bidang tanah; triwulan II sebanyak 8 lokasi/ bidang tanah dan pada triwulan III juga telah terealisasi sesuai target yaitu 7 bidang/lokasi tanah. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN; pada triwulan IV ini telah terealisasi 22,78% dari yang ditargetkan 21%. Adapun pada triwulan sebelumnya terealisasi sebesar 21%.
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	Sampai dengan akhir tahun 2020 Pengamanan BMD Kota Bandung telah terealisasi sesuai target yaitu 30 lokasi/bidang tanah dari target sampai akhir tahun 30 lokasi/bidang tanah, dengan demikian maka capaian kinerja nyata nya adalah 100%. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN tahun 2020 ditargetkan 21% telah tercapai melampaui target yaitu 22,78%, dengan demikian maka capaian kinerja nyata nya yaitu 108,47%
Capaian Kinerja dengan Akhir Renstra	1.1. Capaian kinerja indikator “Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan” pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai target yaitu 2 dokumen yang terdiri dari Laporan BMD tahun 2019 dan Laporan BMD Semester 1 tahun 2020. Begitu pula target capaian akhir Renstra direncanakan sebanyak 2 Dokumen.



	<p>1.2. Capaian kinerja Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan sampai dengan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra telah terealisasi sesuai target yaitu sebanyak 60 bidang/ lokasi tanah, dengan rincian 30 bidang/lokasi pada tahun 2019 dan 30 bidang/lokasi pada tahun 2020, sedangkan target sampai akhir tahun Renstra direncanakan 150 bidang/lokasi tanah. Dengan demikian capaian kinerja Pengamanan BMD Kota Bandung sampai dengan akhir tahun Renstra yaitu $(60 / 150 \times 100\%) = 40\%$</p> <p>1.3. Capaian kinerja untuk indikator “Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN” sampai dengan tahun 2020 yaitu 22,78%, sedangkan target akhir Renstra yaitu 30%. Dengan demikian capaiannya jika dibandingkan sampai dengan akhir Renstra adalah 75,93%</p>
Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Ketepatan waktu penetapan APBD tahun 2020- Ketersediaan anggaran- Koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait lainnya diantaranya pihak kepolisian/Kejaksaan/KPK dalam rangka pengamanan asset, juga dengan pihak BPN dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung
Faktor Penghambat	<p>Masih terdapat beberapa aset tetap berupa tanah yang diklaim oleh pihak lain</p> <p>Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan dalam hal koordinasi baik internal maupun dengan pihak eksternal.</p>
Solusi	<p>Melakukan kerja sama dengan instansi terkait, diantaranya Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal diutamakan secara virtual ataupun secara tatap muka dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang ketat.</p>

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	-	-	-	84,5	85,26	100.80
2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 85,26 dari target sebesar 84,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.90 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan, sedangkan pada Capaian indikator kinerja 2 "Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti" adalah sebesar 100% dari target 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.11

Analisis pencapaian sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu"

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	1.1.Survei Kepuasan Masyarakat/Publik (IKM) didalam penyelenggaraan pelayanan keuangan terhadap perangkat daerah pengguna layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung 1.2.Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti yang berupa status TLHP, Kewajiban setor.
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	1.1.Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat



	<p>kepuasan pengguna layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebanyak 63 responden (perangkat daerah)</p> <p>1.2.Cara pengukuran Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti yaitu jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindalanjuti dibagi jumlah Temuan BPK/Inspektorat dikali 100%.</p>
Kinerja nyata dengan Rencana	<p>Hasil indeks IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2020 yaitu 85,26 dari target yang direncanakan 84,5. Dengan demikian capaiannya yaitu 100,90%. Sedangkan Capaian kinerja nyata prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti adalah 100% dari target yang direncanakan 100%. Dengan demikian capainnya yaitu 100%.</p>
Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKA pada tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali, pada semester I dengan target nilai IKM 84 terealisasi dengan nilai 85, sedangkan semester II ditargetkan bernilai baik dengan point 84,5, telah terealisasi sesuai target yaitu bernilai baik dengan point 85,26. Dengan demikian kinerja nyata untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yang dilaksanakan dua kali, keseluruhannya bernilai baik, dengan nilai melalpaui target.</p>
Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan	<p>Tercapainya target kualitas pelayanan dapat dibuktikan dengan hasil survey kepuasan masyarakat (stakeholder/OPD pengguna layanan BPKA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung) pada tahun 2020 dengan hasil 85,26 atau kriteria "BAIK". Sedangkan prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti telah tercapai 100% dari target yang direncanakan yaitu 100%.</p>
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	<p>Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bernilai BAIK (Memuaskan).</p>
Capaian Kinerja dengan Akhir Renstra	<p>Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKA pada tahun 2020 bernilai "BAIK" Begitu pula target akhir Resntra ditargetkan minimal Bernilai "BAIK". Sedangkan Prosentase Temuan BPK/</p>



	Inspektorat yang Ditindaklanjuti pada tahun 2020 telah tercapai 100%. Begitu pula target akhir Renstra direncanakan dapat ditindaklanjuti 100%.
Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Adanya sistem dan prosedur yang baku dapat dipahami dan dijalankan oleh stakeholder- Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none">- Sarana, prasarana yang masih harus ditingkatkan lagi- Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan keterbatasan koordinasi / pelayanan baik secara internal maupun eksternal.
Solusi	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokoler kesehatan yang ketat.



3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran yang lebih optimal sebagai implementasi perencanaan merupakan rekomendasi dari LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2019. Pada Tahun Anggaran 2019 penyerapan anggaran BPKA adalah sebesar 85,57 %.

Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2020 sebesar Rp.8.823.783.942,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp.7.904.953.681,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau 89,59%.

Dari pagu anggaran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2020 sebesar Rp.8.823.783.942,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 6 (enam) program yang tertuang di 40 (empat puluh) kegiatan.

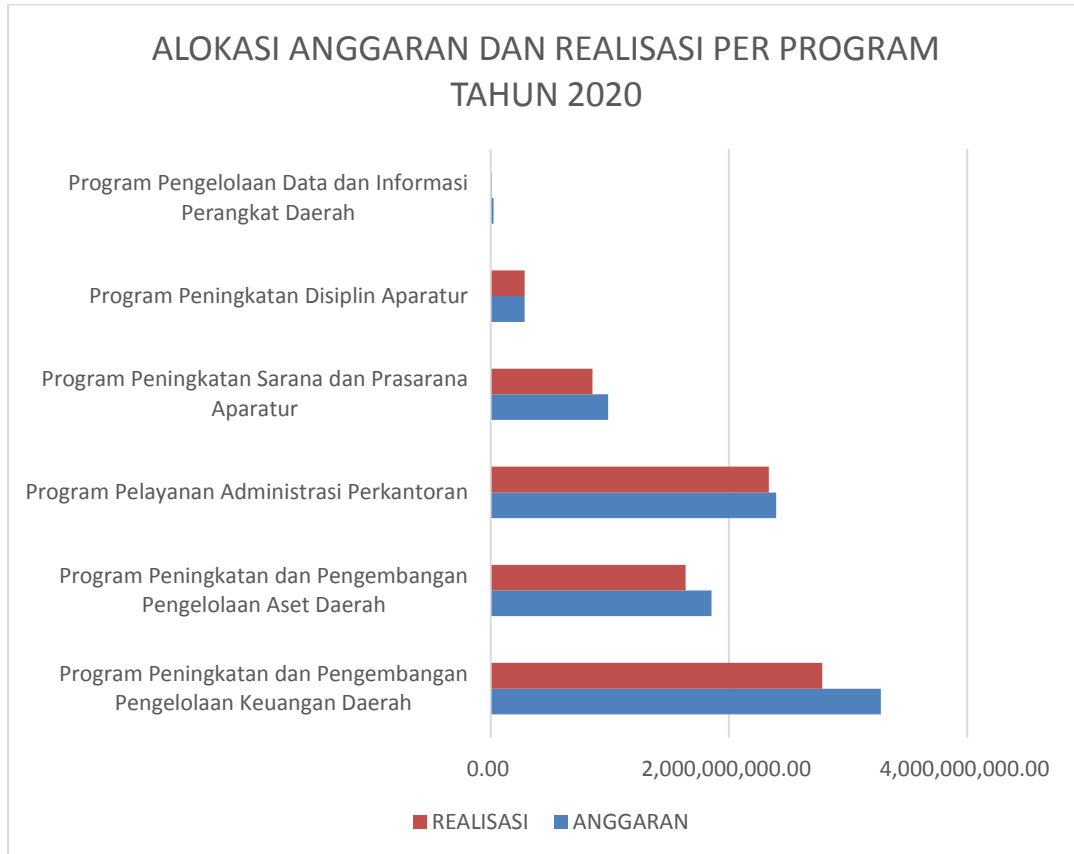
Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Tahun 2020 (unaudited)

NO	SASARAN	NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.274.592.803	2.783.063.936	84,99
II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1.854.453.018	1.635.525.214	88,19
III	Meningkatnya Pelayanan dan Laporan Tepat WaKtu	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.397.680.550	2.336.278.467	97,44
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	987.090.070	854.754.064	86,59
		5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	286.125.000	285.762.000	99,87
		6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	23.842.500	9.570.000	40,14
JUMLAH				8.823.783.942	7.904.953.681	89,59



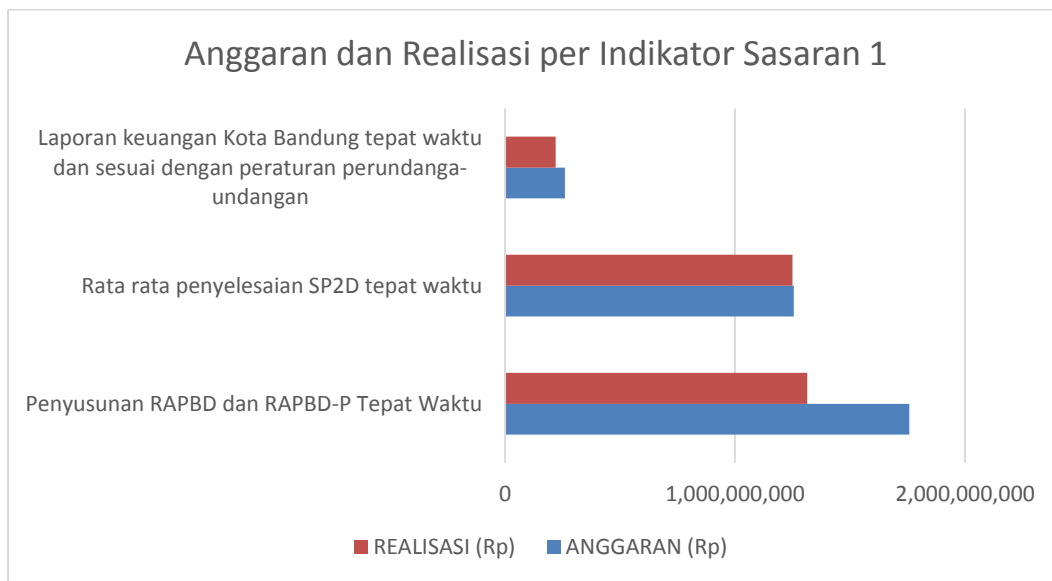
Terlihat pada tabel di atas, dari total anggaran sebesar Rp.8.823.783.942,- terealisasi sebesar Rp.7.904.953.681,- (89,59%). Alokasi anggaran untuk program kegiatan non urusan yang mendukung sasaran “Meningkatnya pelayanan dan Laporan Tepat Waktu” sebesar Rp.3.694.738.120,- terealisasi sebesar Rp.3.486.364.531,-. Anggaran yang mendukung sasaran prioritas yang dituangkan pada program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah dengan jumlah Rp.5.129.045.822,- terealisasi sebesar Rp.4.418.589.150,-. Sedangkan alokasi anggaran berdasarkan pencapaian sasarnya sebagai berikut:

1. Anggaran untuk pencapaian Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” yang terdiri dari 3 indikator sasaran melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Rp.3.274592.803,- terealisasi sebesar Rp.2.783.063.936,- (84,99%). Adapun rincian anggaran dan realisasi per indikator kinerja sasaran ke-1, sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020
----	---------	-------------------	------------



			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Tepat Waktu	1.757.559.503	1.314.130.514
		Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	1.255.814.650	1.249.174.558
		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundanga-undangan	261.218.650	219.758.864
Jumlah			3.694.738.120	3.486.364.531



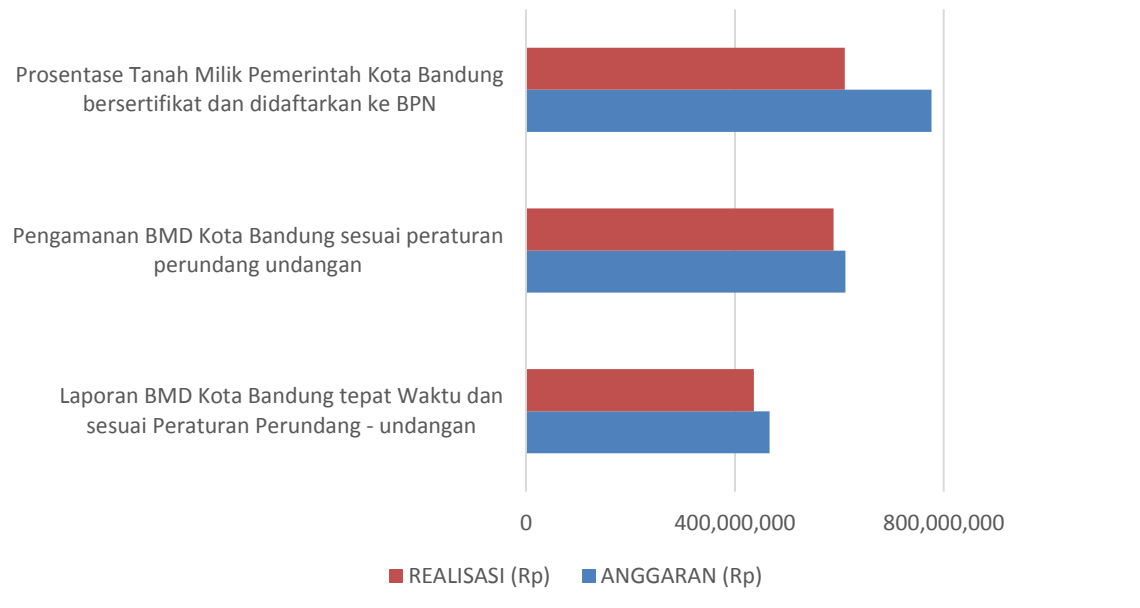


2. Anggaran untuk pencapaian Sasaran ke 2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah” yang terdiri dari 3 indikator sasaran melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan jumlah Rp.1.854.453.018,- terealisasi sebesar Rp.1.635.525.214,- (88,19%). Adapun rincian anggaran dan realisasi per indikator kinerja sasaran ke-2, sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	466.106.581	436.374.500
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	611.798.936	588.963.454
		Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat dan didaftarkan ke BPN	776.547.500	610.187260
Jumlah			1.854.453.018	1.635.525.214



Anggaran dan Realisasi per Indikator Sasaran 2





Tabel 3. 13 Perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	hari kerja	60 dan 30	26 dan 2 HK	157.00	60 dan 30 Hari kerja	46 dan 6 Hari kerja	151.00	60 dan 30	N/A		60 dan 30	N/A		60 dan 30	N/A	
2	Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	hari kerja	2	2 Hari Kerja	100.00	2	2	100.00	2	N/A		2	N/A		2	N/A	
3	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	dokumen	14	14 Dokumen	100.00	14	14	100.00	14	N/A		14	N/A		14	N/A	
4	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	dokumen	2	2	100.00	2	2	100.00	2	N/A		2	N/A		2	N/A	
5	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Tanah/ Lokasi	30	30	100.00	30	30	100.00	30	N/A		30	N/A		30	N/A	
6	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	%	19	20	105.00	21	22,78	108.00	24	N/A		27	N/A		30	N/A	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	-	-	-	84,5	85,26	100.80	85,30	N/A		86,30	N/A		86,50	N/A	
8	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A		100,00	N/A		100,00	N/A	



Keselarasn Pencapaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN	NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.274.592.803	2.783.063.936	84,99	Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	90	52	
							Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	2	2	
							Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	14	14	
II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1.854.453.018	1.635.525.214	88,19	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	2	2	
							Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	30	30	
							Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	21	22,78	
III	Meningkatnya Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.397.680.550	2.336.278.467	97,44	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	84,5 100	85,26 100	
			4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	987.090.070	854.754.064				86,59
			5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	286.125.000	285.762.000				99,87
			6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	23.842.500	9.570.000				40,14
JUMLAH				8.823.783.942	7.904.953.681	89,59				



Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Tahun 2020
Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1 Ketepatan Waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Hari kerja	90 (Tepat waktu)	52 (tepat waktu)	151	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran)	1.757.559.503	1.314.130.514	74,77
		2. Rata rata Penerbitan SP2D tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Hari kerja	2	2	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan)	1.255.814.650	1.249.174.558	99,47
		3.Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	14	14	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Akuntansi)	261.218.650	219.758.864	84,99
		Rata-rata Capaian dari 3 Indikator				117	Total Per Sasaran	3.274.592.803	2.783.063.936	84,99
		Tingkat Efisiensi	32,01 %							
		Tingkat Efektivitas	137,66 %							



Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Tahun 2020
Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah”

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	2.1 Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan	Dokumen	2	2	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran)	1.757.559.503	1.314.130.514	74,77
		2.2 Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Bidang tanah/ Lokasi	30	30	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan)	1.255.814.650	1.249.174.558	99,47
		2.3. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	%	21	22,78	108	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Akuntansi)	261.218.650	219.758.864	84,99
		Rata-rata Capaian dari 3 Indikator				102,67	Total Per Sasaran	3.274.592.803	2.783.063.936	84,99
		Tingkat Efisiensi	14,47 %							
		Tingkat Efektivitas	116,41 %							



Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Tahun 2020
Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu”

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Laporan Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,5	85,26	100,80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.397.680.550	2.336.278.467	94,44
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	987.090.070	854.754.064	86.59
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	286.125.000	285.762.000	99.87
							Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	23.842.500	9.570.000	40.14
		Rata-rata Capaian dari 2 Indikator				100,40	Total Per Sasaran	3.694.738.120	3.486.364.531	94.36
		Tingkat Efisiensi	6,04 %							
		Tingkat Efektivitas	106,40 %							

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 117.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 102.67 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.45 %



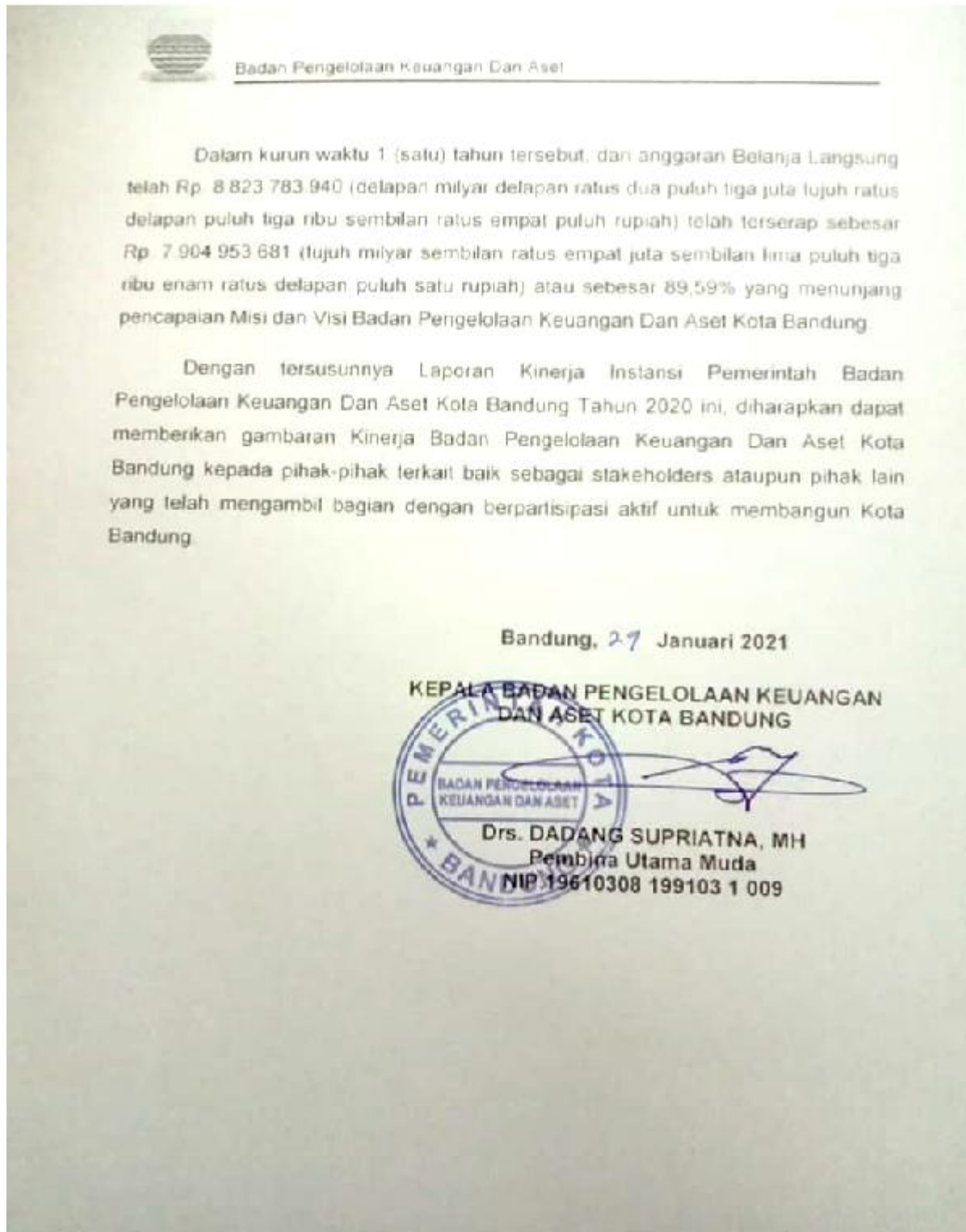


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.823.783.940 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.904.953.681, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 918.830.261, disisi lain target indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator kinerja telah berhasil tercapai, bahkan ada yang melebihi target.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 060/139-BPKA Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2020 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator, telah terealisasi sesuai target sebanyak 2 indikator dan 1 indikator melebihi target. Dengan prosentase capaian 117,00%.
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator, telah terealisasi sesuai target sebanyak 2 indikator, dan 1 indikator berhasil melebihi target. Dengan prosentase capaian 102,67%.
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator, telah terealisasi sesuai target sebanyak 1 indikator, dan 1 indikator berhasil melebihi target. Dengan prosentase capaian 100,45%.



Keputusan dan Keputusan